

Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar

Ni Made Mei Anggreni¹
A. A. G. P. Widanaputra²
I G. A. M. Asri Dwija Putri³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: mei.anggreni@yahoo.com / Telp. 082145721847

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Denpasar. Penentuan sampel dengan menggunakan *nonprobability sampling* yaitu dengan pendekatan *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 32 OPD. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada kepala sub bagian keuangan, bendahara dan pegawai keuangan yang paling senior dimasing-masing OPD. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar. Hal tersebut berarti semakin baik penerapan *good governance* semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan dan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Laporan keuangan, *good governance*, SDM

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the effect of good governance and human resource competence on the quality of financial statements in the government of Denpasar. This research was conducted at Organization of Regional Device (OPD) Denpasar City. Determination of sample by using nonprobability sampling that is by approach of purposive sampling and get sample counted 32 OPD. Methods of data collection in this study by using questionnaires given to the head of the financial sub-department, treasurer and the most senior financial officers in each OPD. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study illustrates that good governance and competence of human resources affect the quality of financial statements of the government of Denpasar. It means the better implementation of good governance is also increasing the quality of financial statements and the higher the competence of human resources is also increasing the quality of financial statements

Keywords: Financial report, *good governance*, HR

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan selalu menjadi pusat perhatian setiap entitas termasuk entitas publik. Pemerintah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang mengandung informasi berkualitas untuk publik sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Pembuatan laporan keuangan guna bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Zeyn,2011). Laporan keuangan harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan PP No. 71 Tahun 2010, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna informasi.

Adanya kebijakan pemerintah tentang perluasan kewenangan otonomi daerah disertai reformasi birokrasi membawa angin segar bagi perkembangan pengelolaan administrasi publik. Dalam perkembangan administrasi publik di Indonesia mengalami perubahan secara drastis mengenai pelimpahan pengelolaan dan tanggungjawab telah diserahkan kewenangannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat regional atau daerah (Kristiansen, *et al*, 2009). Salah satu perubahan mendasar adalah pengelolaan keuangan daerah. Organisasi sektor publik umumnya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah untuk pendanaan dalam melaksanakan pelayanan publik (Campbell, *et al*, 2009). Terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah pada organisasi sektor publik dituntut agar memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) untuk kepentingan masyarakat dan tanggap akan tuntutan lingkungannya. Prinsip *good governance* merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia (Nugraheni dan Subaweh, 2008). Spathis, *et al.* (2002) menyatakan bahwa adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan transparansi dan konsistensi informasi yang dilihat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penerapan *good governance* dalam organisasi sektor publik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari penyajian data yang belum sesuai dengan peraturan dan terbebas dari penyimpangan-penyimpangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterhandalan laporan keuangan dapat dipenuhi jika informasi laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kompetensi

yang dimiliki sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, pelatihan dan kemampuan yang terstandar.

Penerapan PP No 71 Tahun 2010 secara tertib dan konsisten diharapkan setiap pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemerintah Kota Denpasar merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah menrapkan PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dijadikan bahan penilaian untuk menghasilkan opini BPK RI sebagai ukuran kewajaran informasi. Penilaian dari BPK RI yang telah dicapai oleh pemerintah Kota Denpasar dalam penilaian lima tahun terakhir (2012-2016) mendapatkan opini WTP, meskipun opini yang diberikan oleh BPK tersebut baik namun dalam pemeriksaan pelaksanaan di lapangan, BPK menemukan kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar salah satunya adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tentang penerimaan hibah. BPK merekomendasikan agar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) lebih intensif dalam melakukan penagihan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan meminta laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada penerima yang belum menyampaikan dan menghentikan pemberian hibah yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2016).

Kualitas laporan keuangan daerah diindikasikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut yakni *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan. Berkenaan dengan

ulasan di atas, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian guna memperoleh informasi tentang “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah *good governance* berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar dan apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance* pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoretis untuk semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yakni dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat teori agensi yang ada di sektor publik dan memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan, serta diharapkan hasil penelitian dapat memberikan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya dengan fenomena yang serupa. Adapun kegunaan praktis penelitian ini, yakni dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah Kota Denpasar akan pentingnya penerapan *good governance* dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Teori agensi menunjukkan hubungan antara dua pihak yang terlibat kontrak terdiri dari agen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab atas tugas dan prinsipal sebagai pihak memberi tanggung jawab (Widanaputra dan Mimba, 2014). Jensen dan Meckling (1976) juga menggambarkan hubungan teori agensi dimana pemilik entitas (*principal*) memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik. Dalam teori agensi dapat terjadi konflik bila kepentingan pemilik dan manajer berbeda (Nyberg, *et al.*, 2010). Hubungan ini mengalami perbedaan dalam kepentingan agen dan prinsipal, adanya perbedaan informasi yang dimiliki terkait usaha antara agen dengan prinsipal sehingga dapat menimbulkan konflik diantara keduanya (Aikins, 2012).

Desentralisasi fiskal merupakan delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Yudhaningsih, 2010). Pelaksanaan asas otonomi tersebut diserahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan. Oleh karena itu pemerintah daerah diberi kesempatan untuk dapat mengatur daerahnya sendiri dan mengelola keuangan daerah,

Regulasi artinya mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan sesuai dalam penelitian Darmiari dan Ulupui (2014). Istilah regulasi biasanya mengacu pada kegiatan-kegiatan perpajakan, penyubsidian, dan serangkaian ukuran yang dilakukan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi (Posner, 1974). Teori regulasi berperan melaporkan informasi yang relevan dan reliabel serta berfungsi mengakomodir semua kepentingan *stakeholder* (Rudy, 2013). Pada organisasi sektor publik regulasi diperlukan untuk

pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola keuangan daerah dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan selalu berpedoman pada regulasi dan landasan hukum yang telah diatur agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas.

Pembuatan laporan keuangan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas tentang keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Andriani, 2010). Laporan keuangan sebagai data yang dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Selain itu, informasi yang terdapat pada laporan keuangan adalah informasi akuntansi yang dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan para *stakeholder* (Bakar dan Saleh, 2011). Proses penyajian laporan keuangan harus dengan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan manajemen bebas dari salah saji material (Kotsiantis, *et al.*, 2006). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Dewi, 2014). Laporan keuangan yang berkualitas menyajikan informasi tentang bisnis perusahaan secara *relevant* dan *reliable* sesuai dalam penelitian Sari dan Suaryana (2014).

Good governance adalah kesepakatan menyangkut pengaturan suatu wilayah yang diciptakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, kesepakatan

tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana masyarakat mengutarakan kepentingan mereka (Hasyim, 2014). Membangun memerlukan komitmen dan optimisme yang cukup besar dari seluruh komponen dengan melibatkan tiga pilar, yaitu aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memelihara kerjasama dalam membangun tata kelola organisasi yang baik (Nofiantia dan Suseno, 2014). Manfaat yang bisa diterima dari melaksanakan *good governance* yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* (Ristina dan Indah, 2014).

United Nation Development Programme (UNDP) (UNDP, 1997 dalam Mustafa, 2013: 190) mengungkapkan bahwa terdapat sembilan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan demi tercapainya pemerintah yang baik yaitu; partisipasi adalah masyarakat mempunyai hak suara untuk pengambilan keputusan; taat hukum adalah prinsip yang menggambarkan bahwa hukum haruslah ditegakkan; transparansi adalah kebebasan arus informasi terhadap proses dari lembaga-lembaga yang dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan; daya tanggap adalah prinsip yang menyatakan institusi harus cekatan dan peka dalam melayani semua pihak yang berkepentingan; kesetaraan merupakan kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan, dalam prinsip kesetaraan seluruh anggota manajemen dan pegawai haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar (Putri dan Ulupui, 2017: 44); efektivitas dan efisiensi adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik dan tepat guna; akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga *stakeholders*, selain itu dengan adanya akuntabilitas diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Onuorah dan Appah, 2012); visi strategis yaitu pandangan strategis guna menghadapi masa depan; orientasi konsesus yaitu prinsip yang menyatakan bahwa segala keputusan harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus.

Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan suatu instansi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya dapat mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia memegang peranan dalam sebuah organisasi oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintahan (Sukadana dan Mimba, 2015). Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, menyebabkan laporan keuangan disusun dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan akan semakin baik dalam pengambilan keputusan (Wati dkk, 2014).

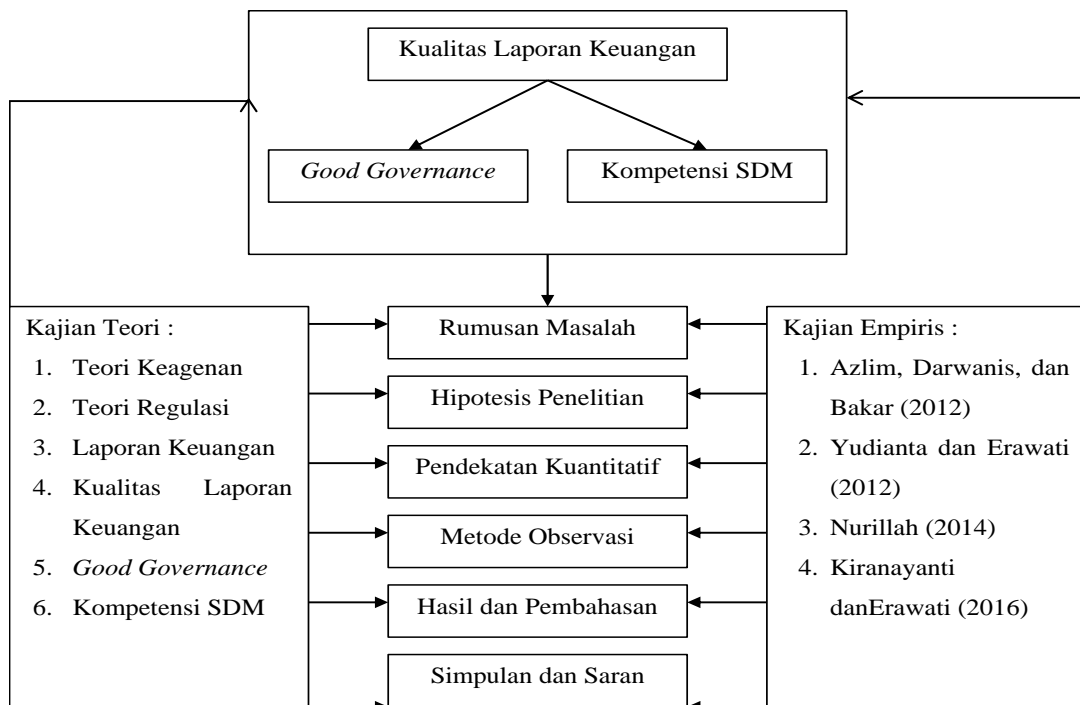
Pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi adalah sumber daya manusia (Delanno dan Deviani, 2013). Oleh karena itu, melalui sumber daya manusia yang efektif dalam hal penempatan tugas, pelatihan, partisipasi, penilaian kinerja, dan kompensasi akan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan organisasi (Chen dan Huang, 2009).Pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD

mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan (Sagara, 2015).

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 2014: 88). Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan variabel yang akan diteliti. Pada organisasi sektor publik *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia diduga mempunyai pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Pemahaman *good governance* merupakan tata kelola organisasi yang baik yang mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Trisnaningsih, 2007). *Good governance* diterapkan pemerintah agar dapat menciptakan birokrasi yang ideal dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik berkaitan dengan pendanaan untuk masyarakat, kemudian pendanaan tersebut dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan pemerintah ke dalam laporan keuangan yang dapat memberikan informasi berkualitas kepada publik.

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting karena sumber daya manusia yang berkompeten mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Juita, 2013). Oleh karena itu, adanya sumber daya manusia yang berkompeten dengan memiliki pengetahuan tentang akuntansi diharapkan dapat menyusun laporan keuangan

sesuai dengan SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu dapat menyajikan informasi yang dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan (Dewi, 2014). Gambar kerangka konseptual dapat dilihat pada Gambar 1. sebagai berikut.



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

Sumber : Data diolah, 2017

Konsep *good governance* mempunyai arti yang luas, dipahami secara berbeda tergantung pada konteksnya (Batubara, 2006). Pengelolaan keuangan secara efektif setiap OPD di pemerintah daerah merupakan salah satu pelayanan publik yang dapat dilakukan untuk pembiayaan operasional kepada masyarakat, hal tersebut dapat didukung dengan menerapkan 9 karakteristik *good governance*

yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, orientasi konseus. Pengelolaan keuangan OPD yang menerapkan *good governance* secara efektif sangat potensial dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan kemudian akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Azlim, Darwanis, dan Bakar (2012) yang membuktikan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh pada kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Berdasarkan ulasan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ : Semakin baik penerapan *good governance* akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

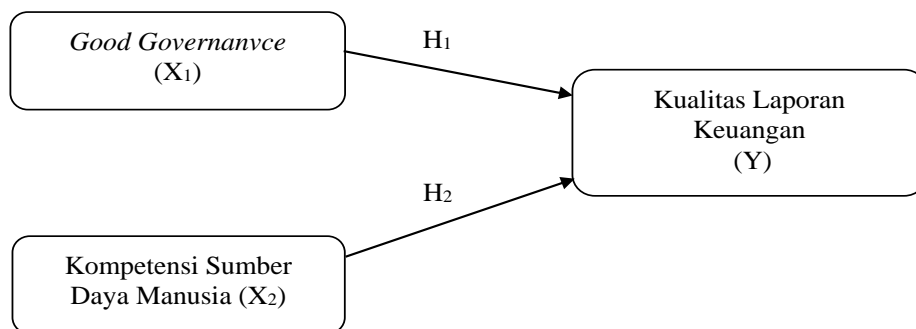
Sumber daya manusia merupakan individu yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas. Pengelolaan keuangan daerah agar dapat terselenggara secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dasar memadai maksudnya adalah menempatkan orang yang tepat pada pekerjaannya, sehinggatujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara maksimal. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya sangat penting dilakukan, seperti sumber daya manusia yang memiliki keahlian akuntansi dapat berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Yudianta dan Erawati (2012), Nurillah dan

Muid (2014), Kiranayanti dan Erawati (2016) dan menemukan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan ulasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang dilakukan pada pemerintahan Kota Denpasar. Obyek penelitian adalah pejabat struktural dan pengelola unit kerja pada setiap OPD pemerintah Kota Denpasar yang bekerja di bagian keuangan. Dimana pengelola yang dimaksud adalah kepala sub bagian, bendahara dan pegawai paling senior dimasing-masing OPD. Variabel dependen penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan dan variabel independennya yaitu *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia. Adapun gambar desain penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.
Desain Penelitian

Sumber : Data Diolah, 2017

Pengukuran kualitas laporan keuangan dilakukan dengan memodifikasi instrumen penelitian sesuai dalam Nurillah dan Muid (2014). Memodifikasi

instrumen yang dimaksud yaitu mengembangkan instrumen penelitian yang awalnya terdiri dari 8 pernyataan menjadi 16 pernyataan dengan 8 indikator, yaitu: aktivitas keuangan dimasa lalu, memprediksi masa yang akan datang, ketepatan waktuan penyajian, pengambilan keputusan, disajikan wajar dan jujur, informasi dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami, sesuai SAP.

Pengukuran penerapan *good governance* dilakukan dengan memodifikasi instrumen penelitian sesuai dalam Darmawiguna dan Mimba (2017). Memodifikasi instrumen yang dimaksud yaitu mengembangkan instrumen penelitian yang awalnya terdiri dari 10 pernyataan menjadi 18 pernyataan dengan 9 indikator, yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, orientasi konseus.

Pengukuran kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan memodifikasi instrumen penelitian sesuai dalam Kiranayanti dan Erawati (2016). Memodifikasi instrumen yang dimaksud yaitu mengembangkan instrumen penelitian yang awalnya terdiri dari 7 pernyataan menjadi 14 pernyataan dengan 7 indikator, yaitu: pemahaman tentang akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian dalam tugas, sosialisasi peraturan baru, pemahaman tentang struktur organisasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa jawabankuesioner, dan data kualitatif yaitu gambaran umum pemerintah Kota Denpasar, sejarah berdirinya Kota Denpasar dan lainnya. Sumber data yakni data

primer berasal dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah pengelola unit kerja dan pejabat struktural OPD di pemerintah Kota Denpasar. Teknik penentuan sampel menggunakan *nonprobability sampling* yaitu dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan cara penentuan sampel melalui kriteria tertentu (Sugiyono, 2014: 122). Kriteria yang digunakan penelitian ini yakni: 1) perangkat daerah yang bertugas di OPD yang berbentuk dinas dan badan yakni sebanyak 32 OPD, 2) perangkat daerah yang menjabat sebagai kepala sub bagian keuangan di OPD yang berbentuk dinas dan badan, 3) perangkat daerah yang menjabat sebagai bendahara yang bekerja di OPD berbentuk dinas dan badan minimal dua tahun, 3) pegawai keuangan yang bekerja di OPD berbentuk dinas dan badan yang memiliki masa kerja paling lama atau pegawai paling senior. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan jumlah sampel penelitian, maka jumlah pejabat struktural atau pegawai yang digunakan sebagai sampel berjumlah 96 orang, yang masing-masing OPD diberikan 3 kuesioner.

Metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner penelitian diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan skala empat poin. Memodifikasi skala *likert* yakni meniadakan jawaban di tengah dengan pertimbangan jawaban yang di tengah akan menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah (*central tendency effect*), terutama untuk responden yang ragu-ragu menjawab (Hadi dalam Badera, 2008). Wawancara yakni cara pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dalam menemukan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2014: 411).

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam mempelajari catatan peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono, 2014: 422).

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum menganalisis regresi, uji asumsi klasik yang digunakan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residualnya mempunyai data yang terdistribusi normal atau tidak (Utama, 2016:99). Model regresi yang baik merupakan data yang terdistribusi normal (Ghozali, 2006:147). Metode yang digunakan adalah statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan yaitu 5%, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila $sig > \alpha$ (Utama, 2016: 101).

Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Utama, 2016:111). Memprediksi ada atau tidaknya korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak adanya multikolinieritas (Utama, 2016:111).

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila bila nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan bernilai signifikan jika lebih besar dari 0,05 (Utama, 2016:112). Model regresi yang baik yakni apabila tidak terjadi heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen.

Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai apakah terdapat pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan analisis yang dilakukan adapun yang bisa diamati yakni nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*), uji kelayakan model (uji F) dan uji hipotesis (uji t). *Adjusted R square* menggambarkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel terikat (Ikhsan, 2008: 249). Uji F untuk menguji model regresi linear berganda yang digunakan dalam menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat apakah layak digunakan. Uji t menggambarkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2006:88).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh OPD di Kota Denpasar. Hasil penyebaran 96 kuesioner yang diberikan kepada pengelola unit kerja keseluruhannya kembali beserta pengisian lengkap serta memenuhi kriteria, dan tidak ada kuesioner yang gugur. Pengelola yang dimaksud adalah kepala sub bagian keuangan, bendahara dan pegawai paling senior dimasing-masing OPD, dengan alasan pemilihan obyek tersebut didasarkan keterlibatannya dalam proses penyelesaian secara rutin laporan keuangan tahunan yang berpedoman pada PP nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Data karakteristik responden adalah data responden yang dikumpulkan untuk mengerahui profil responden. Dari hasil penelitian yang dilakukan

padapejabat struktural pemerintah Kota Denpasar, maka diketahui gambaran karakteristik responden meliputi tiga aspek yaitu usia, pendidikan serta masa kerja responden. Adapun tabel karakteristik responden sebagai berikut.

Tabel 1.
Karakteristik Responden

Data	Jumlah	Persentase
Usia		
21-30	17	17,7%
31-40	22	22,9%
41-50	33	34,3%
51-60	24	25%
Total	96 responden	100
Lama Bekerja		
2 tahun	21	21,8%
3-4 tahun	18	18,7%
> 5 tahun	57	59,3%
Total	96 responden	100
Latar Belakang Pendidikan		
SMA/ sederajat	16	16,6%
Diploma	14	14,5%
S1	50	52,1%
S2	16	16,6%
Total	96 responden	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dilihat dari Tabel 1. proporsi responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 17 responden yaitu 17,7 persen, yang berusia 31-40 tahun sebanyak 22 orang dengan persentase 22,9 persen, yang berusia 41-50 tahun sebanyak 33 responden dengan persentase 34,3 persen dan yang berusia 51-60 tahun sebanyak 24 responden dengan persentase 25 persen. Hal ini menggambarkan bahwa yang menjadi responden pada penelitian ini lebih banyak yang berusia 41-50 tahun.

Dilihat dari Tabel 1. karakteristik responden berdasarkan lama bekerja sebagai pegawai dapat menjelaskan pengalaman kerja responden di bagian keuangan. Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa responden yang telah bekerja selama 2 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 21,8 persen, yang telah bekerja selama 3-4 tahun sebanyak 18 orang dengan persentase 18,7 persen, yang telah

bekerja selama lebih dari 5 tahun sebanyak 57 orang dengan persentase 59,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja responden di bagian keuangan pada penelitian ini lebih banyak responden yang telah bekerja lebih dari 5 tahun.

Dilihat dari Tabel 1.karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir berguna untuk mengetahui tingkat pendidikan para responden di bagian keuangan. Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat sebanyak 16 orang dengan persentase 16,6 persen, Diploma sebanyak 14 orang dengan persentase 14,5 persen, S1 sebanyak 50 orang dengan persentase 52,1 persen dan S2 sebanyak 16 orang dengan persentase 16,6 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan responden pada penelitian ini didominasi oleh tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 50 orang.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
<i>Good Governance</i>	96	2,53	4,00	3,3077	0,35180
Kompetensi Sumber Daya Manusia	96	2,38	4,00	3,2393	0,35021
Kualitas Laporan Keuangan	96	2,50	4,00	3,3124	0,38075

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2. disimpulkan bahwa jumlah pengamatan (N) penelitian ini berjumlah 96. Variabel *good governance* mempunyai nilai minimum sebesar 2,53 dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata sebesar 3,3077. Standar deviasi pada variabel *good governance* adalah sebesar 0,35180. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya adalah 0,35180.

Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai minimum sebesar 2,38 dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata sebesar 3,2393. Standar deviasi pada variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 0,35021. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya adalah 0,35021.

Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 2,50 dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata sebesar 3,3124. Standar deviasi pada variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 0,38075. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya adalah 0,38075.

Tabel 3.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Keterangan	Uji Normalitas	Uji Multikolonieritas		Uji Heteroskedastisitas
		Tolerance	VIF	Sig.
<i>Good Governance</i> (X ₁)		0,441	2,266	0,087
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)		0,441	2,266	0,264
Asym. Sig	0,188			

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa Asymp. Sig (2-tailed) untuk model regresi penelitian ini lebih besar dari 0,05. Hasil ini berarti model regresi tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam kedua model regresi tidak terjadi multikolonieritas. Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, dengan demikian model regresi ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda guna mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *for windows*. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4.
Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,364	0,249		1,457	0,148
Good Governance (X ₁)	0,432	0,106	0,399	4,061	0,000
Kompetensi SDM (X ₂)	0,469	0,107	0,431	4,386	0,000
Adjusted R ²	0,595				
F Hitung	70,670				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa model *summary* besarnya *Adjusted R²* untuk variabel terikat kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,595, ini berarti variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 59,5%, sedangkan sisanya sebesar 40,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada kesempatan ini.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung untuk variabel terikat kualitas laporan keuangan sebesar 70,670 dengan signifikansi $F = 0,000$, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa variabel independen X₁ dan X₂, mampu memprediksi atau menjelaskan kualitas laporan keuangan (Y) di pemerintah Kota Denpasar.

Hasil uji statistik t (uji hipotesis) menunjukkan besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian secara parsial variabel *good governance* (X_1) dan kompetensi sumber daya manusia (X_2) pada kualitas laporan keuangan (Y) di pemerintah Kota Denpasar. Tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi variabel *good governance* adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti penerapan *good governance* berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar atau semakin baik penerapan *good governance* akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_2 diterima, yang berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar atau semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4. diketahui bahwa tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu semakin baik penerapan *good governance* akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar diterima. Penerapan *good governance* bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dari *good governance* dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan

keuangan yang taat dengan aturan, memiliki prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pemerintah kota Denpasar meraih penghargaan indeks keuangan terbaik di Jogjakarta pada bulan September 2017, peraih penghargaan tersebut didasari dengan penerapan *good governance* untuk mengelola keuangan daerah secara sehat dan transparan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dalam Suyatra(2017). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Azlim, Darwanis, dan Bakar (2012) yang membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good governance* berpengaruh pada kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4. diketahui bahwa tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) yaitu semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar diterima. Kompetensi sumber daya manusia di Kota Denpasar memang tergolong tinggi karena adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pegawai yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang akuntansi memang merupakan upaya pemerintah daerah agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengelola keuangan daerah secara efektif. Oleh karena itu, Kota Denpasar berhasil meraih opini WTP dari tahun 2012-2016 yang awalnya pada tahun 2011 sempat mendapatkan opini WDP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudianta dan Erawati (2012),

Nurillah dan Muid (2014), Kiranayanti dan Erawati (2016) yang membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai bagaimana *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kuesioner dengan item-item pernyataan yang lebih relevan dan diharapkan dapat melibatkan kepala OPD sebagai sampel penelitian. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, seperti pengalaman kerja aparatur dan sistem pengendalian intern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan *good governance* berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal ini memberi gambaran bahwa semakin baik penerapan *good governance* semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu menerapkan *good governance* secara konsisten atau dapat meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan *good governance*.

Beberapa penyusun laporan keuangan setiap OPD memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda atau tidak hanya berasal dari latar belakang akuntansi, dengan demikian pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat selalu membuat program terkait pengembangan atau peningkatan pemahaman tentang akuntansi.

REFERENSI

- Aikins, S. K. (2012). Determinants of Auditee adoption of audit recommendations: Local government auditors' perspective. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24(2), 195–220.
- Amran. 2009. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, 4 (2), hal. 2397-2413.
- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5 (1), hal. 69-80.
- Azlim, Darwanis, dan Usman Abu Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), hal. 1-14.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar 2016.
- Badera, I Dewa Nyoman. 2008. Pengaruh Kesesuaian Hubungan Corporate Governance Dengan Budaya Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan. *Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada*.
- Bakar, Nur Barizah Abu dan Zakiah Saleh. 2011. Incentives for Disclosure of Accounting Information in Public Sector: A Literature Survey. *International Research Journal of Finance and Economics*, 75, hal. 24-38.
- Batubara, Alwi Hasyim. 2006. Konsep *Good Governance* dalam Konsep Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, 3 (1), hal. 1-6.
- Campbell, John, Craig Mcdonald dan Tsholofelo Sethibe. 2009. Public and

- Private Sector It Governance: Identifying Contextual Differences. *Australasian Journal Of Information Systems*, 16 (2), hal. 5-18.
- Chen, Chung-Jen dan Jing-Wen Huang. 2009. Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance — The Mediating Role of Knowledge Management Capacity. *Journal of Business Research*, 62, hal. 104–114.
- Darmiari, Ni Putu Desy dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2014. Karakteristik Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (1), hal. 38-57.
- Delanno, Galuh Fajar dan Deviani. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WRA*, 1 (1).
- Dewi, P. Ayu Ratna. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Denpasar. *Skripsi Universitas Udayana Denpasar*.
- Ghozali, H. Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasyim, A. Dardiri. 2014. *Good Governance dan Piagam Madinah. Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA*.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), hal. 305-360.
- Juita, S. D. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (2), hal. 1290-1318.

- Kotsiantis, S., E. Koumanakos, D. Tzelepis dan V. Tampakas. 2006. Forecasting Fraudulent Financial Statements using Data Mining. *International Journal Of Computational Intelligence*, 3 (2), hal.104-110.
- Kristiansen, Stein, Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, dan Erwan Agus Putranto. 2009. Public Sector Reforms And Financial Transparency: Experiences From Indonesian Districts1. *A Journal Of International And Strategic Affairs*, 31 (1), hal. 64-87.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016. 30 Mei 2017. Nomor 14.A/LHP/XIX.DPS/05/2017.
- Lillrank, Paul. 2003. “The quality of information”, *International Journal of Quality & Reliability Managemen*, 20 (6),hal. 691-703.
- Mustafa, Delly H. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nofiantia, Leny dan Novie Susanti Suseno. 2014. Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and Their Implications Towards Performance Accountability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, hal. 98 – 105.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13 (1), hal. 48-58.
- Nurillah, As Syifa, dan Dul Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi*, 3 (2).
- Nyberg, Anthony J., et al. 2010. Agency Theory Revisited: CEO Return and Shareholder Interest Alignment. *Academy of Management Journal*, 53(5), hal. 1029–1049.
- Onuorah, Anastasia Chi-Chi dan Appah, Ebimobowei. 2012. Accountability and Public Sector Financial Management in Nigeria. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(6), hal. 1-17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

- Posner, Richard A. 1974. Theories of Economic Regulation. *Bell Journal of economics*, 5(2), hal. 335-358.
- Putri, I Gusti Ayu Made Asri Dwija dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2017. *Pengantar Corporate Governance*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Ristina Sitio dan Indah Anisykurlillah, 2014. Pengaruh Pemahaman *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor KAP di Wilayah Kota Semarang. *Jurnal Accounting Analysis*, 3 (3), hal. 301 – 309.
- Rudy. 2013. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Setelah Penerapan PSAK Berbasis IFRS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). *Tesis Universitas Lampung*.
- Sari, Luh Indah Novita Dan I G. N. Agung Suaryana. 2014. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pada Efisiensi Investasi Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8 (3), hal. 524-537.
- Sagara, Yusar. 2015. The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6 (10), hal. 111-115.
- Spathis Ch., M. Doumpos dan C. Zopounidis. 2002. Detecting Falsified Financial Statements: A Comparative Study Using Multicriteria Analysis and Multivariate Statistical Techniques. *The European Accounting Review*, 11(3), hal. 509-535.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadana, Ikrima Chikita dan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaL Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12 (1), hal. 35 – 49.
- Suyatra, I Putu. 2017. Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Indeks Keuangan Terbaik.
<https://www.jawapos.com/baliexpress/read/2017/09/08/12399/pemkot-denpasar-raih-penghargaan-indeks-keuangan-terbaik>. Diakses tanggal 20 Oktober 2017.
- Trisnaningsih, Sri. 2007 Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan

dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hassanudin Makassar.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Utama, Made Suyana. 2016. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif (Edisi Keenam)*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.

Wati, Kadek Desiani, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2 (1).

Widanaputra, A.A. dan N.P.S.H. Mimba. 2014. The Influence of Participative Budgeting on Budgetary Slack in Composing Local Governments' Budget in Bali Province. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 164, hal. 391-396.

Yudhaningsih, Resi. 2010. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Regional di Indonesia. *Teknis*, 5 (1), hal. 46-52.

Yudianta, I Gede Agus dan Ni Made Adi Erawati. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1 (1).

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1 (1), hal. 21-37.